



DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BONE



TAHUN 2020



Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Bone Tahun 2019 dapat diselesaikan, sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan selama Tahun 2018.

Laporan Kinerja (LKj) Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Bone Tahun 2019 merupakan capaian akuntabilitas kinerja pada tahun pertama dalam masa RENSTRA Tahun 2018-2023. LKj Tahun 2019 disusun berdasarkan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2018 yang dijabarkan dari Rencana Strategis (RENSTRA Tahun 2018-2023).

LKj Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Bone disusun berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2016. Penyusunan LKj Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Bone Tahun 2019 merupakan bentuk komitmen terhadap aspek transparansi dan akuntabilitas serta pertanggungjawaban atas kinerja Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Bone. Komitmen dalam penyusunan LKj Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Bone, bertujuan memberikan informasi kinerja yang terukur, sekaligus sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Perhubungan Kabupaten Bone untuk senantiasa meningkatkan kinerjanya.

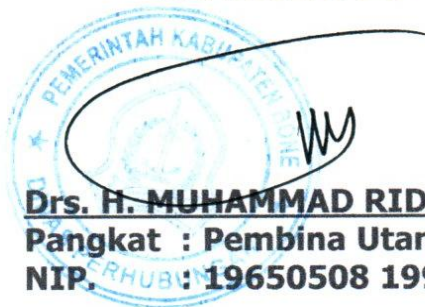
Cakupan LKj Dinas Perhubungan Kabupaten Bone Tahun 2019 terdiri atas : Pendahuluan, Perencanaan & Perjanjian Kinerja, Akuntabilitas Kinerja dan inovasi dalam skema reformasi birokrasi. Pendahuluan memiliki muatan uraian singkat organisasi, seperti : latar, maksud, isu strategis, dan struktur serta keragaman sumber daya manusia di Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Bone.

Adapun aspek Perencanaan dan Perjanjian Kinerja menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, IKU dan PK. Sedangkan aspek akuntabilitas kinerja, memberikan gambaran capaian, analisa, dan evaluasi terhadap indikator kinerja utama Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Bone pada tahun 2018, termasuk atas analisa efisiensi penggunaan sumber daya.

Secara keseluruhan penyelenggaraan tugas-tugas SKPD Dinas Perhubungan Kabupaten Bone Tahun 2019 telah banyak membuahkan hasil yang positif. Dari 3 (tiga) indikator kinerja utama, semua indikator yang telah memenuhi target yang ditetapkan. Analisa dan evaluasi atas capaian kinerja secara komprehensif digunakan sebagai pijakan untuk melakukan perbaikan pelayanan dan mendukung tercapainya good governance pada masa mendatang. Berkenaan dengan itu, LKj Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Bone Tahun 2019 ini, dapat menjadi masukan dan saran evaluasi agar kinerja kedepan menjadi lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Watampone, 12 Februari 2020

KEPALA DINAS

The image shows a circular official stamp of the Kabupaten Bone Government. The text around the stamp reads "PEMERINTAH KABUPATEN BONE". In the center of the stamp is a logo. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink.

Drs. H. MUHAMMAD RIDWAN, M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. : 19650508 199303 1 010



KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan	2
C. Gambaran Umum Dinas Perhubungan	3
D. Isu Strategis	9

BAB II PERENCANAAN KINERJA

I. Rencana Strategis	10
A. Visi dan Misi	10
B. Tujuan dan Indikator Kinerja	12
C. Sasaran	13
D. Program untuk Pencapaian Sasaran	15
II. Perjanjian Kinerja Tahun 2018	16
III. Indikator Kinerja Utama (IKU)	17
IV. Rencana Anggaran Tahun 2018	18

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi	21
A.I. Capaian Indikator Kinerja Utama 2017	21
A.II. Perbandingan Capaian Kinerja	22
B. Akuntabilitas Keuangan	27

BAB IV PENUTUP 31

LAMPIRAN



Tabel 1.1	Potensi Pegawai menurut Jabatan/Status	6
Tabel 1.2	Potensi Pegawai menurut Golongan	6
Tabel 1.3	Sarana dan Prasarana Dinas Perhubungan	7
Tabel 1.4	Sarana dan Prasarana Transportasi Darat	8
Tabel 2.1	Tujuan dan Indikator Kinerja SKPD Dinas Perhubungan Kab. Bone	13
Tabel 2.2	Sasaran dan Indikator Kinerja SKPD Dinas Perhubungan Kab. Bone	14
Tabel 2.3	Program untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2018	16
Tabel 2.4	Perjanjian Kinerja SKPD Dinas Perhubungan Kab. Bone Tahun 2018	17
Tabel 2.5	Indikator Kinerja Utama SKPD Dinas Perhubungan Kab. Bone Tahun 2018	18
Tabel 2.6	Rencana Belanja SKPD Dinas Perhubungan Kab. Bone Tahun 2018	18
Tabel 2.7	Alokasi per Sasaran Tahun Anggaran 2018	19
Tabel 3.1	Capaian Indikator Kinerja SKPD	21
Tabel 3.2	Capaian Indikator Kinerja Utama	22
Tabel 3.3	Capaian Indikator Kinerja Sasaran	23
Tabel 3.4	Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Sasaran	23
Tabel 3.5	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada Sasaran	25



Gambar 1 Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kab. Bone



A. LATAR BELAKANG

Kondisi sosial ekonomi masyarakat yang masih memprihatinkan dewasa ini menuntut adanya perbaikan yang menyeluruh di segala bidang tidak terkecuali bidang pemerintahan. Untuk itu, dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang baik (good governance) diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas, terukur dan sah sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab.

Dinas Perhubungan Kabupaten Bone sebagai instansi pemerintah wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya sebagai pengelola sumber daya yang dituangkan melalui Laporan Kinerja (LKj) sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kabupaten Bone.

Laporan Kinerja (LKj) merupakan bentuk formal pertanggung jawaban Instansi Pemerintah dalam mencapai Misi dan tujuan Organisasi yang dapat bermanfaat antara lain :

- Merupakan pendorong bagi Instansi Pemerintah untuk menyelenggarakan tugas Pemerintahan dan Pembangunan secara benar dan baik.
- Menjadikan Instansi Pemerintah yang Akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsive terhadap aspirasi masyarakat sehingga kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah tetap terjamin dan terpelihara.

- Menjadi masukan dan ungkapan baik bagi pihak yang berkepentingan dalam rangka peningkatan Kinerja Instansi Pemerintah.

B. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Dinas Perhubungan bertujuan untuk memberikan pertanggung jawaban atas Kinerja Dinas dalam rangka mewujudkan Visi, Misi dan tujuan yang akan dicapai dinas.

Oleh karena itu dari LKj dapat diketahui dan informasi mengenai capaian kinerja dinas, hambatan dan strategi pemecahan masalah serta diharapkan pula diperoleh umpan balik dari semua pihak yang berkepentingan dalam rangka peningkatan kinerja Dinas Perhubungan di masa yang akan datang. Dengan berpedoman pada Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) maka Dinas Perhubungan Kab. Bone menyusun LKj tahun 2016 sebagai wujud pertanggung jawaban Dinas Perhubungan Kab. Bone dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai Peraturan Daerah Kab. Bone No. 03 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas-dinas Daerah Kab. Bone.

Penyusunan LKj Dinas Perhubungan Kab. Bone tahun 2018 ini akan menjadi bagian dari laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kab. Bone yang bertujuan menjadi bahan laporan pertanggung jawaban Bupati Bone tahun 2019.

Penyajian informasi Kinerja Dinas Perhubungan tahun 2019 ini disadari belum sepenuhnya dapat memuaskan semua pihak, namun secara terus menerus diupayakan penyempurnaan sehingga lebih transparan dan akuntabil untuk dapat mewujudkan iklim Pemerintahan yang baik dan benar dimasa mendatang.

C. Gambaran Umum Dinas Perhubungan

1. Kondisi Utama Organisasi

Dinas Perhubungan Kabupaten Bone merupakan salah satu Dinas Teknis Pemerintah Kab. Bone yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah No. 03 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas – dinas Daerah Kab. Bone.

Kepala Dinas Perhubungan sebagai unsur Pemerintah Kabupaten / bertanggung jawab kepada Bupati Bone dalam pelaksanaan tugas Pemerintah dan Pelayanan di bidang Perhubungan terutama pada :

- Bidang Sekretariat
- Bidang Lalu Lintas Jalan
- Bidang Angkutan dan Keselamatan Transportasi Darat
- Bidang Pengembangan Transportasi
- UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor
- UPTD Terminal dan Perparkiran
- Pendapatan Asli Daerah (PAD)

2. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi

Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Pembentukan Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Bone yang direvisi pada menjadi Peraturan Bupati No. 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bone, maka perlu dipaparkan **Tugas Pokok dan Fungsi** Dinas Perhubungan Kabupaten Bone seperti dibawah ini.

Tugas Pokok : Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang perhubungan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

Fungsi :

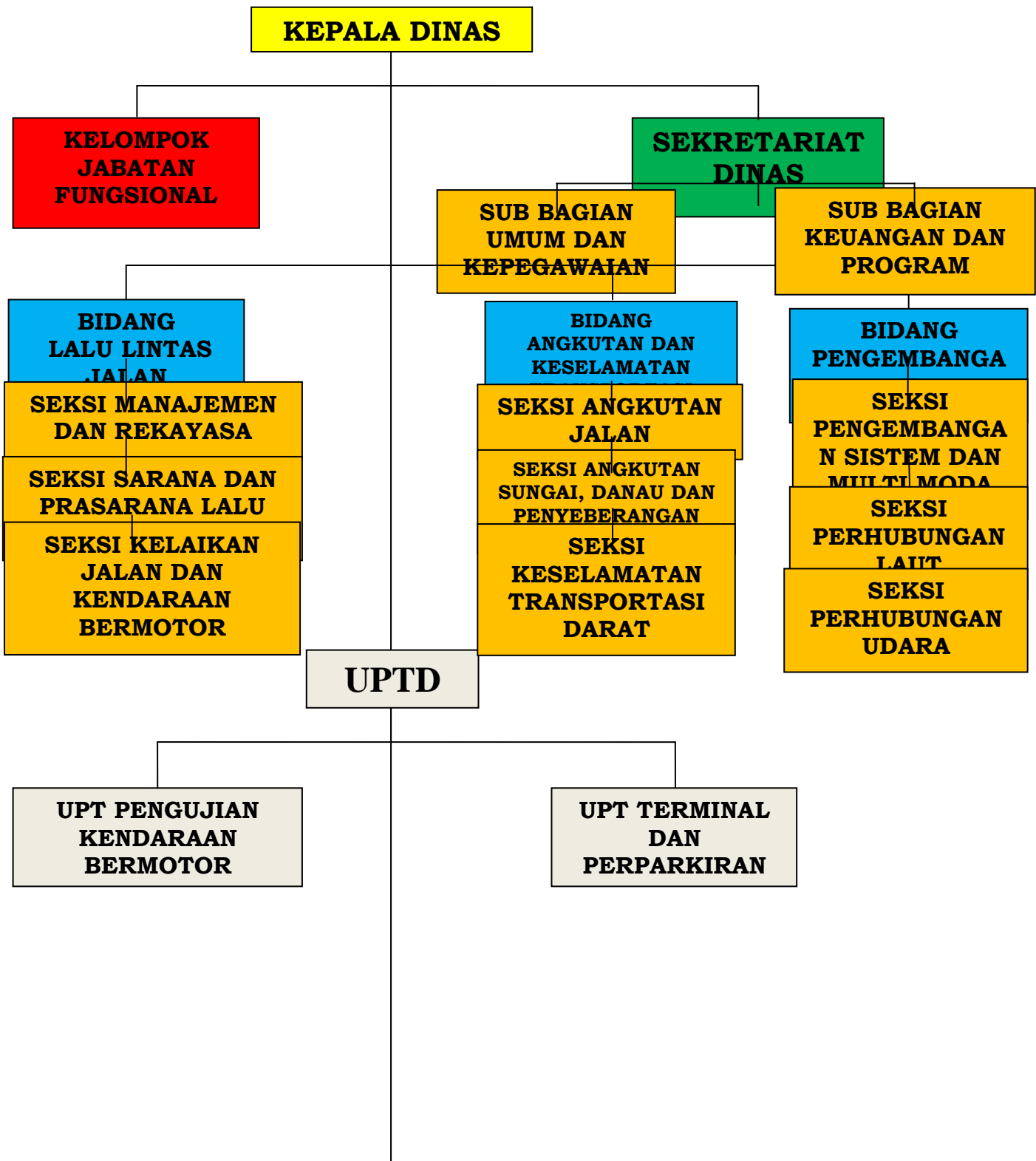
1. Perumusan kebijakan di bidang perhubungan;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang perhubungan;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perhubungan;
4. Pelaksanaan administrasi di bidang perhubungan;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Struktur Organisasi

Struktur organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Bone terdiri dari 1 Kepala Dinas; 1 Sekretaris yang membawahi 2 Kepala Sub Bagian yang terdiri dari sub. bagian kepegawaian dan umum, sub. bagian program dan keuangan; 3 Kepala Bidang yang membawahi bagiannya masing-masing: Kepala Bidang Lalu Lintas Jalan yang membawahi seksi manajemen dan rekayasa, seksi sarana dan prasarana lalu lintas, dan seksi kelaikan jalan dan kendaraan bermotor; Kepala Bidang Angkutan dan Keselamatan Transportasi Darat yang membawahi seksi angkutan jalan, seksi angkutan sungai, danau dan penyeberangan, seksi keselamatan transportasi darat; Kepala Bidang Pengembangan Transportasi yang membawahi seksi pengembangan sistem dan multimoda, seksi perhubungan laut, dan seksi perhubungan udara; serta UPTD pengujian kendaraan bermotor dan UPTD terminal dan perparkiran yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas Perhubungan. Yang dituangkan dalam gambar sebagai berikut :

Gambar. 2.1

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN



2.2. Sumber Daya Aparat

Pemerintah dalam pelaksanaan tugas organisasi sebagaimana Dinas Perhubungan Kab. Bone sangat ditentukan oleh sumber daya yang baik, dari sumber daya manusia maupun sumber daya alam.

Khususnya sumber daya manusia (Pegawai) merupakan faktor utama dalam melaksanakan kegiatan pada Dinas Perhubungan Kab. Bone.

Adapun potensi pegawai pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bone dapat digambarkan sebagai berikut :

I. Menurut Jabatan / Status

Tabel 1.1

No	U r a i a n	Posisi Awal	Tambah	Kurang	Posisi Akhir
1.	Eselon I	-	-	-	-
2.	Eselon II	1	-	-	1
3.	Eselon III	3	-	-	3
4.	Eselon IV	11	-	-	11
5.	S t a f	32	-	4	28
6.	Honorar	140	5	-	145
	J u m l a h	187	5	4	188

II. Menurut Golongan

Tabel 1.2

No	U r a i a n	Posisi Awal	Tambah	Kurang	Posisi Akhir
1.	Gol. IV	4	1	-	5
2.	Gol. III	23	1	-	24
3.	Gol. II	18	-	3	15
4.	Gol. I	2	-	2	-
	J u m l a h	47	2	5	44

3. Sarana dan Prasarana

a. Sarana Dinas Perhubungan Kab. Bone

Dalam rangka pelaksanaan tugas – tugas operasional Dinas Perhubungan Kab. Bone Tahun Anggaran 2019 di dukung oleh Sarana dan Prasarana sebagai berikut :

Tabel 1.3
SARANA DAN PRASARANA DINAS PERHUBUNGAN

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN 2018	HASIL 2019	KONDISI SAMPAI DENGAN 2019
1.	Kendaraan Roda 4	Unit	3	-	3
2.	Bus Sekolah	Unit	2	-	2
3.	Kendaraan Roda 2	Unit	31	-	31
4.	Komputer	Unit	13	2	15
5.	Mesin Ketik	Buah	3	-	3
6.	Laptop	Unit	6	2	8
7.	Printer	Unit	4	3	7
8.	Faximili	Unit	1	-	1
9.	AC	Unit	8	-	8
10.	Meja	Buah	79	2	81
11.	Kursi	Buah	162	54	216
12.	Lemari	Buah	18	-	18
13.	Filling Kabinet	Buah	4	-	4
14.	Website	Unit	1	-	1
15.	Papan Pengumuman	Buah	1	-	1
16.	Mesin Rumput	Unit	1	-	1
17.	Kawat Faximile	Paket	1	-	1
18.	Mesin Absensi (Ceklok)	Unit	1	-	1
19.	Kamera CCTV	Buah	-	2	2
JUMLAH			339	65	404

Peralatan kantor dirasakan masih kurang dibandingkan dengan fasilitas tempat kerja (Gedung) dari jumlah Pegawai yang ada.

b. Sarana dan Prasarana Transportasi dalam Kab. Bone

Gambaran pelayanan transportasi di Kabupaten Bone yang bertujuan untuk peningkatan sarana dan prasarana baik yang diusulkan Pemerintah maupun pihak swasta / BUMN adalah sebagai berikut :

1. Transportasi Darat

- a. - Jalan Propinsi : 254.85 Km
 - Jalan Kabupaten : 4.484.70 Km
 - Jembatan : 1.275 M
 - Terminal Type A : 1 buah
- (Di kelola oleh Kementerian Perhubungan)
- Terminal Type C : 1 buah
- (Sementara proses pembangunan)

- b. Sarana Kendaraan Umum
 - Bus Besar : 25 unit
 - Bus Sedang : 47 unit
 - Bus Kecil : 27 unit
 - Taksi : 11 unit
 - Mobil Pribadi / Dinas : 4.971 unit
 - Mobil Penumpang Umum :
 - ANGKOT : 344 unit
 - ANGDES : 52 unit

Tabel 1.4
SARANA DAN PRASARANA TRANSPORTASI DARAT

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN 2018	HASIL 2019	KONDISI SAMPAI DENGAN 2019
1.	Rambu Lalu Lintas/Papan Nama Jalan	Unit	398	-	398
2.	Marka Jalan	Meter Lari	18.299,5	1.055,9	19.355,4
3.	Paku Marka Jalan	Buah	701	-	701
4.	Cermin Tikungan	Buah	15	-	15
5.	Traffic Light	Unit	39	-	39
6.	Deliniator	Buah	27	-	27
7.	Guadrill/Pagar Pengaman Jalan	Meter	378	-	378
8.	Zona Selamat Sekolah	Paket	2	-	2
9.	Road Barrier	Buah	50	-	50
JUMLAH			19.909,5	4.824,5	20.965,4

- 2. Transportasi ASDP
 - a. Prasarana Pelabuhan
 - Pelabuhan Penyeberangan BajoE : 1 buah
 - b. Sarana Kapal
 - Kapal Ferry : 9 buah
- Kegiatan transportasi melalui jalur penyeberangan BajoE – Kolaka pada tahun 2019 yang telah sudah terlayani yaitu :
- Penumpang : 104.968 Orang
 - Kendaraan : 40.308 Unit
- (Sumber Data : OPP BajoE)*

3. Transportasi Laut

Kegiatan Transportasi Laut masih di dominasi oleh pelayaran rakyat yang melayani pelayaran antar pulau melalui pelabuhan (Talud) Pallime, UloE, BajoE, Kading, Pattiro, Lapangkong dan Tuju – tuju (dikelola oleh kementerian).

4. Transpotasi Udara

Pada tahun 2019 Bandar Udara Arung Palakka Bone tidak dapat beroperasi sebagaimana mestinya, hal ini disebabkan karena tidak adanya maskapai penerbangan yang beroperasi pada Bandara Arung Palakka Bone.

D. Isu Strategis

Isu strategis yang dihadapi Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kab. Bone yang dituangkan dalam Renja tahun 2019 adalah :

1. Keselamatan lalu lintas.
2. Penurunan harga bahan bakar minyak.
3. Kelembagaan.



I. RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Bone Tahun 2018 – 2023 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bone 2018 – 2023. Rencana Strategis (Renstra) sebagai dokumen perencanaan yang memuat penjabaran visi, misi, tujuan, sasaran dan program Perangkat Daerah selama 5 tahun yang berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

A. VISI DAN MISI

- VISI

Visi adalah pandangan kehidupan menyangkut kemana Dinas Perhubungan harus di bawah dan diarahkan agar dapat bekerja secara konsisten, tetap akses, antisipasi, inovatif secara produktif sedangkan Visi berisikan cita dan citra yang akan diwujudkan sesuai laporan masyarakat.

Dinas Perhubungan Kabupaten Bone merupakan salah satu Dinas Teknis Daerah, yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2008 dan bertanggung jawab kepada bupati dalam pelaksanaan tugas Pemerintah dan Pelayanan di bidang Perhubungan dalam rangka mendukung visi Pemerintah Kabupaten Bone selama kurun waktu lima tahun ke depan yaitu :

" MASYARAKAT BONE YANG MANDIRI, BERDAYA SAING, DAN SEJAHTERA "

Rumusan visi di atas mencakup tiga pokok visi yakni "Masyarakat Bone yang religius", Masyarakat Bone yang Berdaya Saing", dan Masyarakat Bone yang Sejahtera". Adapun makna dari ketiga visi tersebut adalah sebagai berikut :

MANDIRI : kemampuan nyata pemerintah daerah dan masyarakatnya dalam mengatur dan mengurus kepentingan daerah/rumah tangganya sendiri menurut prakarsa dan aspirasi masyarakatnya, termasuk di dalamnya upaya yang sungguh-sungguh secara bertahap mampu mengurangi ketergantungan terhadap pihak-pihak lain namun tetap melakukan kerja sama dengan daerah-daerah lain yang saling menguntungkan.

BERDAYA SAING : mengandung makna terwujudnya kemampuan masyarakat Kabupaten Bone untuk memanfaatkan keunggulan inovasi, komparatif dan kompetitif yang berbasis sumber daya lokal dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan sehingga mampu bersaing secara regional, nasional bahkan internasional.

SEJAHTERA : mengandung makna semakin meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar yang berkelanjutan dalam aspek ekonomi, pendidikan, kesehatan, politik, sosial budaya, lingkungan hidup yang dilingkupi dengan suasana kehidupan yang religius, aman dan kondusif serta didukung infrastruktur dan tata kelola pemerintahan yang baik.

- **MISI**

Misi merupakan sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah, sesuai visi yang ditetapkan, agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik.

Sesuai visi yang telah ditetapkan telah diwujudkan pula misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).
2. Mengembangkan kemandirian ekonomi masyarakat dan meningkatkan taraf hidup masyarakat.
3. Meningkatkan akses, pemerataan dan kualitas pelayanan kesehatan, pendidikan dan sosial dasar lainnya.

4. Mengoptimalkan akselerasi pembangunan daerah berbasis desa dan kawasan perdesaan.
5. Mendorong penciptaan iklim investasi yang kondusif untuk pengembangan usaha dan mengembangkan inovasi daerah dalam peningkatan pelayanan publik.
6. Mengembangkan budaya politik, penegakan hukum, dan seni budaya dalam kemajemukan masyarakat.

B. Tujuan dan Indikator Kinerja

Berdasarkan Misi RPJMD diatas, Dinas Perhubungan mengacu pada misi : (1). Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN); dan (2) Mengoptimalkan akselerasi pembangunan daerah berbasis desa dan kawasan perdesaan. Maka ditetapkan tujuan yang ingin diwujudkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Bone selama lima tahun ke depan adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Bone dan mengembangkan praktek penyelenggaraan pemerintahan yang baik;
- b. Mengembangkan insfratraktur dasar agar bisa terpenuhinya aksebilitas jalan khususnya pada keselamatan dan kelengkapan jalan;
- c. Menjamin keselamatan masyarakat dalam menggunakan moda transportasi.

Indikator kinerja dan target kinerja untuk masing-masing tujuan strategis diuraikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.1
Tujuan dan Indikator Kinerja SKPD
Dinas Perhubungan Kab. Bone

TUJUAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET AKHIR RENSTRA
Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Bone dan mengembangkan praktek penyelenggaraan pemerintahan yang baik.	Meningkatnya kinerja aparatur			
	Indeks kepuasan masyarakat	Persen	81	85
	Indeks reformasi birokrasi	Indeks		
	Opini BPK atas laporan keuangan	Status	WTP	WTP
	Nilai SAKIP	Predikat	C	B
Mengembangkan insfratraktur dasar agar bisa terpenuhinya akseibilitas jalan khususnya pada keselamatan dan kelengkapan jalan.	Proporsi panjang jalan dalam kondisi mantap	Persen	60	85
	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	Rasio	1:75	1:80
	Rasio izin trayek	Rasio	0,0010	0,0030
Menjamin keselamatan masyarakat dalam menggunakan moda transportasi.	Pemasangan rambu-rambu	Unit	150	50
	Persentase pelayanan angkutan	Persen	60	70
	Jumlah uji kir angkutan umum	Buah	1.810	11.049
	Persentase kepemilikan angkutan umum	Persen	60	70

C. Sasaran

Mengacu kepada tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan adalah sebagai berikut :

Tujuan 1 : Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Bone dan mengembangkan praktek penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Sasaran : Meningkatnya profesionalisme pegawai yang mampu mengembangkan potensi diri yang dapat menunjang peningkatan pelayanan dan kualitas pekerjaan serta membaiknya pelaksanaan pemerintahan dan pelayanan.

Tujuan 2 : Mengembangkan insfratraktur dasar agar bisa terpenuhinya aksesibilitas jalan khususnya pada keselamatan dan kelengkapan jalan.

Sasaran : Meningkatnya ketersediaan layanan insfrartuktur dasar.

Tujuan 3 : Menjamin keselamatan masyarakat dalam menggunakan moda transportasi.

Sasaran : Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana transportasi yang berkualitas dan didukung dengan sumber daya manusia transportasi yang handal, efesien dan efektif.

Tabel 2.2
Sasaran dan Indikator Kinerja SKPD
Dinas Perhubungan Kab. Bone

SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET AKHIR RENSTRA
Meningkatnya profesionalisme pegawai yang mampu mengembangkan potensi diri yang dapat menunjang peningkatan pelayanan dan kualitas pekerjaan serta membaiknya pelaksanaan pemerintahan dan pelayanan.	Meningkatnya kinerja aparatur			
	Indeks kepuasan masyarakat	Persen	81	85
	Indeks reformasi birokrasi	Indeks		
	Opini BPK atas laporan keuangan	Status	WTP	WTP
	Nilai SAKIP	Predikat	C	B

SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET AKHIR RENSTRA
Meningkatnya ketersediaan layanan insfrartuktur dasar.	Proporsi panjang jalan dalam kondisi mantap	Persen	60	85
	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	Rasio	1:75	1:80
	Rasio izin trayek	Rasio	0,0010	0,0030
Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana transportasi yang berkualitas dan didukung dengan sumber daya manusia transportasi yang handal, efesien dan efektif.	Pemasangan rambu-rambu	Unit	150	50
	Persentase pelayanan angkutan	Persen	60	70
	Jumlah uji kir angkutan umum	Buah	1.810	11.049
	Persentase kepemilikan angkutan umum	Persen	60	70

D. PROGRAM UNTUK PENCAPAIAN SASARAN

Berdasarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RENSTRA, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program-program. Adapun program-program untuk mendukung masing-masing sasaran tahun 2018 sebagai berikut :

Tabel 2.3
Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2019

SASARAN	PROGRAM PENDUKUNG
Meningkatnya profesionalisme pegawai yang mampu mengembangkan potensi diri yang dapat menunjang peningkatan pelayanan dan kualitas pekerjaan serta membaiknya pelaksanaan pemerintahan dan pelayanan.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
	Program Penunjang Pemerintahan Umum
Meningkatnya ketersediaan layanan insfrartuktur dasar.	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana transportasi yang berkualitas dan didukung dengan sumber daya manusia transportasi yang handal, efesien dan efektif.	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan
	Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas
	Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor

II. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen pernyataan/kesepakatan antara atasan dan bawahan untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan satu instansi. Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja dan target kinerja beserta program dan anggaran. Penyusunan PK 2019 dilakukan dengan mengacu kepada RENSTRA, RENCANA KERJA (RENJA) 2019, IKU dan APBD. Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kab. Bone telah menetapkan PK sebagai berikut :

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah Dinas Perhubungan
Tahun 2019

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUN 2019
Meningkatnya ketersediaan layanan insfrartuktur dasar dan aksebilitas jalan	Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan	Rasio	1:75
	Rasio Ijin Trayek	Rasio	0,0010
Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana transportasi yang berkualitas dan didukung dengan sumber daya manusia transportasi yang handal, efesien dan efektif	Pemasangan Rambu-rambu	Unit	150
	Persentase Pelayanan Angkutan Umum	Persen	60
	Jumlah Uji Kir Angkutan Umum	Buah	1.810
	Persentase Kepemilikan Kir Angkutan Umum	Persen	60

III. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil berbagai Program dan Kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi. SKPD Dinas Perhubungan Kab. Bone telah menetapkan IKU sebagai berikut:

Tabel 2.5
Indikator Kinerja Utama SKPD
Dinas Perhubungan Tahun 2019

SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
Meningkatnya ketersediaan layanan insfrartuktur dasar dan akseibilitas jalan	Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan	Rasio	1. Jumlah peralatan pengujian kendaraan bermotor yang terpelihara 2. Jumlah kendaraan bermotor yang telah melakukan pengujian kendaraan bermotor	Bidang Lalu Lintas Jalan
	Rasio Ijin Trayek	Rasio		
Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana transportasi yang berkualitas dan didukung dengan sumber daya manusia transportasi yang handal, efesien dan efektif	Pemasangan Rambu-rambu	Unit		
	Persentase Pelayanan Angkutan Umum	Persen		
	Jumlah Uji Kir Angkutan Umum	Buah	Jumlah fasilitas perlengkapan jalan	Bidang Lalu Lintas Jalan
	Persentase Kepemilikan Kir Angkutan Umum	Persen	$\frac{\text{Jumlah pemeliharaan sarana dan prasarana perhubungan}}{\text{Jumlah sarana dan prasarana perhubungan}} \times 100\%$	Bidang Lalu Lintas Jalan

IV. RENCANA ANGGARAN TAHUN 2019

Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kab. Bone, maka jumlah pendanaan yang dimungkinkan untuk dibelanjakan pada Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar Rp. 6.079.594.575,- yang digunakan untuk membiayai Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Secara rinci rencana anggaran Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.6
Rencana Belanja SKPD
Dinas Perhubungan Tahun 2019

No.	Uraian	Rencana (Rp.)	%
1.	Belanja Tidak Langsung	Rp. 3.974.594.575,-	100
2.	Belanja Langsung	Rp. 2.105.000.000,-	100
Jumlah		Rp. 6.079.594.575,-	100

Alokasi anggaran belanja langsung tahun 2019 yang dialokasikan untuk membiayai program-program yang langsung mendukung pencapaian sasaran pembangunan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.7
Alokasi per Sasaran Tahun Anggaran 2019

SASARAN	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	PERSENTASE ANGGARAN
<i>Meningkatnya akuntabilitas kinerja urusan Perhubungan dalam pelaksanaan pemerintahan dan pelayanan</i>	Predikat evaluasi SAKIP dan APIP	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.009.126.000	100%
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	14.200.000	
		Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	535.800.000	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan	10.000.000	
		Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	314.300.000	
		Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	134.826.000	
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	287.500.000	100%
		Pengadaan Peralatan Gedung	110.000.000	
		Pengadaan Mebeleur	31.500.000	
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	20.000.000	
		Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	119.000.000	
		Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	7.000.000	
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	42.125.000	100%
		Pendidikan dan Pelatihan Formal	42.125.000	
		Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	33.000.000	100%
		Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	33.000.000	
		Penunjang Pemerintahan Umum	41.200.000	100%
		Pengelolaan Website Perangkat Daerah	41.200.000	

SASARAN	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	PERSENTASE ANGGARAN
<i>Meningkatnya ketersediaan layanan infrastruktur dasar dan aksesibilitas jalan</i>	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	25.000.000	100%
	Rasio ijin trayek	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	25.000.000	
<i>Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana transportasi yang berkualitas dan didukung dengan sumber daya manusia transportasi yang handal, efisien dan efektif</i>	Persentase pelayanan angkutan umum	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	104.920.000	100%
	Jumlah uji KIR angkutan umum	Rehabilitasi / Pemeliharaan Sarana Alat Pengujian Kendaraan Bermotor	59.920.000	
		Rehabilitasi / Pemeliharaan Traffic Light	45.000.000	
		Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	104.029.000	100%
		Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di Jalan Raya	51.029.000	
		Koordinasi dalam Peningkatan Pelayanan Angkutan	53.000.000	
	Pemasangan Rambu-rambu	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	77.000.000	100%
		Pengadaan Rambu-rambu Lalu Lintas	17.000.000	
		Pengadaan Marka Jalan	60.000.000	
	Persentase kepemilikan Kir angkutan umum	Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	133.600.000	100%
		Pelaksanaan Uji Ptik Kendaraan Bermotor	133.600.000	
	JUMLAH		1.855.000.000	100%



A. KERANGKA PENGUKURAN KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bone Tahun 2019 diukur berdasarkan capaian kinerja organisasi sesuai dengan Perjanjian Kinerja Dinas Perhubungan pada tahun 2019. Akuntabilitas Kinerja ini menyajikan hasil pengukuran kinerja terhadap target capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja dari sasaran – sasaran strategis yang telah ditetapkan beserta realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi berdasarkan dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2019 dan Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2018-2023.

Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan indikator kinerja sasaran digunakan skala pengukuran ordinal dengan pendekatan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, sebagai berikut :

Tabel 3.1.
Skala Pengukuran Ordinal

NO	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
1	>100 %	Baik Sekali
2	76 % ≤ 100%	Baik
3	66 % ≤ 75 %	Cukup
4	51 % ≤ 65 %	Kurang
5	≤ 50%	Sangat Kurang

Berdasarkan tabel tersebut di atas, setiap indikator kinerja dari sasaran yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2019, dapat dinilai kriteria realisasi kinerjanya berdasarkan persentase capaian kinerja yang diperoleh dari perbandingan antara realisasi kinerja dengan target kinerja yang telah ditetapkan.

B. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI
B.I. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA 2019

Rincian tingkat capaian sasaran yang telah ditetapkan dengan melihat tingkat capaian kinerja masing-masing indikator kinerja. Dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kabupaten Bone Tahun 2018 – 2023 terdapat 3 sasaran dengan 7 indikator. Sasaran 1 terdapat 1 indikator kinerja, sasaran 2 terdapat 2 indikator kinerja dan sasaran 3 terdapat 4 indikator kinerja diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 3.2
Capaian Indikator Kinerja Perangkat Daerah
Dinas Perhubungan Kabupaten Bone Tahun 2019

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	KRITERIA KINERJA
1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja urusan Perhubungan dalam pelaksanaan pemerintahan dan pelayanan	Predikat Evaluasi SAKIP dan APIP	Predikat	B	B	100	Baik
2.	Meningkatnya ketersediaan layanan insfraktur dasar dan aksesibilitas jalan	Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan	Rasio	1:75	1:75	100	Baik
		Rasio Ijin Trayek	Rasio	0,0010	0,0006	60	Kurang
3.	Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana transportasi yang berkualitas dan didukung dengan sumber daya manusia transportasi yang handal, efisien dan efektif	Pemasangan Rambu-rambu	Unit	150	16	10,66	Sangat Kurang
		Persentase Pelayanan Angkutan Umum	Persen	60	50	83,33	Baik
		Jumlah Uji Kir Angkutan Umum	Buah	1.810	3.230	178,45	Baik Sekali
		Persentase Kepemilikan Kir Angkutan Umum	Persen	60	60	100	Baik

Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Pemilihan dan Penetapan Indikator Kinerja Utama harus memenuhi karakteristik yaitu spesifik, dapat dicapai, relevan, menggambarkan keberhasilan sesuatu yang diukur dan dapat dikuantifikasi dan diukur. Capaian Pengukuran Indikator Kinerja Utama di Tahun 2019 dapat digambarkan melalui tabel di bawah ini:

Tabel 3.3
Capaian Indikator Kinerja Utama

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1.	Predikat Evaluasi SAKIP dan APIP	Predikat	B	B	100
2.	Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan	Rasio	1:75	1:75	100
3.	Rasio Ijin Trayek	Rasio	0,0010	0,0006	60
4.	Pemasangan Rambu-rambu	Unit	150	16	10,66
5.	Persentase Pelayanan Angkutan Umum	Persen	60	50	83,33
6.	Jumlah Uji Kir Angkutan Umum	Buah	1.810	3.230	178,45
7.	Persentase Kepemilikan Kir Angkutan Umum	Persen	60	60	100

B.II. PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA

Pelaksanaan program / kegiatan Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kab. Bone tahun 2019 sesuai dengan penetapan kinerja yang telah dilakukan, maka untuk mengevaluasi sasaran, program dan kegiatan yang telah ditetapkan dapat diketahui dengan melihat indikator-indikator yang terkait dengan sasaran, program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Berdasarkan format Pengukuran Kinerja yang telah dibuat dengan merujuk pada Indikator Kinerja Utama dan Renstra perangkat daerah, maka capaian Pengukuran Kinerja Kegiatan Tahun 2019 dari Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kab. Bone dapat dijelaskan melalui uraian tiap sasaran berikut di bawah ini:

Sasaran 1 : Meningkatnya akuntabilitas kinerja urusan Perhubungan dalam pelaksanaan pemerintahan dan pelayanan.

a. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Sasaran

Tabel 3.4
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Urusan Perhubungan Dalam Pelaksanaan Pemerintahan Dan Pelayanan

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja urusan Perhubungan dalam pelaksanaan pemerintahan dan pelayanan	Predikat Evaluasi SAKIP dan APIP	Predikat	B	B	100

Untuk pengukuran Indikator Capaian berdasarkan Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP untuk Tahun Anggaran 2019 mendapatkan nilai B mencapai 100%, hal tersebut disebabkan karena tiap tahun dilakukan evaluasi oleh Inspektorat Provinsi dan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI dilakukan setelah batas akhir penyusunan LKj sampai dengan 2 bulan setelah tahun anggaran berakhir dan untuk Kabupaten / Kota dilaksanakan 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir sehingga pelaksanaan evaluasi menyesuaikan dengan batas akhir penyampaian LKj tersebut.

b. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Sebelumnya

Tabel 3.5
Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Sasaran 1. Tahun 2018 s/d 2019

No	Indikator Kinerja	Capaian		
		2017	2018	2019
1.	Predikat Evaluasi SAKIP dan APIP	CC	C	B

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa untuk tahun 2018 meraih predikat C yang mengalami kenaikan dari tahun 2017 dengan capaian CC, sedangkan untuk tahun 2019 kembali mengalami kenaikan dengan capaian B.

c. Perbandingan Dengan Target Akhir Renstra

No	Indikator Kinerja	Realisasi		
		2019	2023	%
1.	Predikat Evaluasi SAKIP dan APIP	B	A	

Berdasarkan perbandingan dengan akhir target renstra diatas, belum bisa disampaikan dalam laporan ini karena evaluasi SAKIP oleh APIP belum dilaksanakan.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan Atau Peningkatan / Penurunan Kinerja Serta Alternative Solusi Yang Telah Dilakukan

Penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja sebagai berikut :

Berdasarkan tabel tersebut di atas dapat diketahui bahwa capaian kinerja pada tahun 2019 nilai dalam laporan kinerja 2019 mencapai B, disebabkan evaluasi oleh Inspektorat Kabupaten dilaksanakan setelah penyusunan laporan kinerja ini.

e. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 3.5
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada Sasaran 1

No	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (%)	Efesiensi (%)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5=3-4</i>
1.	Predikat Evaluasi SAKIP dan APIP	100	97,47	100
	Rata – rata capaian kinerja	100		

Berdasarkan perbandingan diatas, capaian kinerja indikator predikat evaluasi SAKIP oleh APIP menunjukkan predikat Baik 100% berjalan sebanding dengan realisasi anggaran dengan persentase mencapai 97,47% dari total yang dialokasikan.

f. Analisis Program / Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja.

Program dari sasaran ini adalah Pelayanan Administrasi Perkantoran; Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur; Peningkatan Disiplin Aparatur; Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur; Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan; dan Penunjang Pemerintahan Umum. Adapun Indikator Kinerja dari sasaran ini dapat dilihat pada tabel 3.1 diatas yaitu Predikat Evaluasi SAKIP oleh APIP dengan capaian kinerja B. Adapun alokasi anggaran untuk mendukung program ini adalah sebesar Rp. 1.412.951.000,- realisasi sebesar Rp. 1.377.294.543,- atau 97,94% dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk mencapai sasaran ini adalah

**Tabel. 3....
Program dan Kegiatan**

No	Indikator Sasaran	Program/ Kegiatan	Anggaran		
			Target	Realisasi	%
1.	Predikat evaluasi SAKIP dan APIP	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.009.126.000	995.656.757	98,67%
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	14.200.000	12.103.257	85,23%
		Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	535.800.000	524.650.000	97,92%
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan	10.000.000	10.000.000	100%
		Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	314.300.000	314.103.600	99,94%
		Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	134.826.000	134.799.900	99,98%
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	287.500.000	287.440.786	99,98%
		Pengadaan Peralatan Gedung	110.000.000	110.000.000	100%
		Pengadaan Mebeleur	31.500.000	31.500.000	100%
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	20.000.000	19.998.431	99,99%
		Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	119.000.000	118.942.355	99,95%
		Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	7.000.000	7.000.000	100%
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	42.125.000	20.000.000	47,48%
		Pendidikan dan Pelatihan Formal	42.125.000	20.000.000	47,48%
		Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	33.000.000	32.997.000	99,99%
		Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	33.000.000	32.997.000	99,99%
		Penunjang Pemerintahan Umum	41.200.000	41.200.000	100%
		Pengelolaan Website Perangkat Daerah	41.200.000	41.200.000	100%

g. Permasalahan dan Alternatif Solusi.

Walaupun capaian pada sasaran 1 ini sudah optimal namun masih tetap ada permasalahan yang ditemukan antara lain Masih lemahnya Sumber Daya Manusia (SDM) aparat. Dengan demikian maka solusi yang ditempuh adalah diharapkan adanya penambahan personil dari aparat pembina (ASN) yang memiliki keahlian dan keterampilan dibidang perhubungan dan untuk mendukung kelancaran kegiatan diharapkan adanya peningkatan pembinaan/pelatihan (Bimtek) kepada aparat.

Sasaran 2 : Meningkatnya ketersediaan layanan infrastruktur dasar dan aksesibilitas jalan.

a. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Sasaran

Tabel 3.3
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Ketersediaan Layanan Infrastruktur Dasar Dan Aksesibilitas Jalan

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1.	Meningkatnya ketersediaan layanan infrastruktur dasar dan aksesibilitas jalan	Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan	Rasio	1:75	1:75	100
		Rasio Ijin Trayek	Rasio	0,0010	0,0006	60

.....

b. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Sebelumnya

Tabel 3.4
Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Sasaran 2. Tahun 2018 s/d 2019

No	Indikator Kinerja	Capaian		
		2017	2018	2019
1.	Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan	-	1:75	1:75
2.	Rasio Ijin Trayek	-	0,0004	0,0006

Realisasi capaian indikator kinerja pertama pada sasaran kedua tahun 2019 mencapai 1:75 dari target 1:75, sama capaiannya dari tahun 2018 (tahun sebelumnya) sebesar 1:75. Sedangkan realisasi capaian indikator kinerja kedua pada sasaran kedua tahun 2019 mencapai 0,0006 dari target 0,0010, lebih besar capaiannya dari tahun 2018 (tahun sebelumnya) sebesar 0,0004.

c. Perbandingan Dengan Target Akhir Renstra

No	Indikator Kinerja	Realisasi		
		2019	2023	%
1.	Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan	1:75	1:100	
2.	Rasio Ijin Trayek	0,0010	0,0030	

Berdasarkan perbandingan dengan akhir target renstra diatas, maka untuk rasio panjang jalan..... belum bisa disampaikan dalam laporan ini karena evaluasi SAKIP oleh APIP belum dilaksanakan.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan Atau Peningkatan / Penurunan Kinerja Serta Alternative Solusi Yang Telah Dilakukan

Penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja sebagai berikut :

Berdasarkan tabel tersebut di atas dapat diketahui bahwa capaian kinerja pada tahun 2019 terealisasibelum disampaikan dalam laporan kinerja 2019 disebabkan evaluasi oleh Inspektorat Kabupaten dilaksanakan setelah penyusunan laporan kinerja ini.

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa realisasi capaian kinerja untuk sasaran *kedua* ini secara umum sudah mencapai nilai baik dari target indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2019.

1. Pada kegiatan Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah yaitu Jumlah cabang olahraga yang dibina pada kejuaran daerah pelajar tingkat provinsi di Makassar tahun 2019 telah terlaksana dengan baik dan tepat waktu dengan capaian targe sebesar 100% dari target 5 cabang olahraga dan terealisasi sebanyak 5 Cabang olahraga, ini berkat kerjasama Pegawai

Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bone serta dukungan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bone.

Adapun solusi yang dilakukan adalah :

d. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 3.5
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada Sasaran 2

No	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (%)	Efisiensi (%)
1	2	3	4	5=3-4
1.	Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan	100	99,56	0,44
2.	Rasio Ijin Trayek	100		
	Rata – rata capaian kinerja	100		

Bagian ini terkait dengan efisiensi anggaran untuk sasaran Meningkatnya ketersediaan layanan infrastruktur dasar dan aksesibilitas jalan pada indikator sasaran ini, terdapat satu kegiatan yang pencapaian kinerjanya mencapai 99,56%. Terlihat bahwa kedua Indikator sasaran, menunjukkan pencapaian dengan predikat **Baik dan Kurang**.

e. Analisis Program / Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja.

Program dari sasaran ini adalah Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan. Indikator Kinerja dari sasaran ini dapat dilihat pada tabel 3...1 diatas yaitu Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan dengan capaian kinerja 100% dan Rasio Ijin Trayek dengan capaian kinerja 60%. Adapun alokasi anggaran untuk mendukung program ini adalah sebesar Rp. 25.000.000,-dengan realisasi sebesar Rp. 24.890.000,- atau 99,56% dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk mencapai sasaran ini adalah

f. Permasalahan dan Alternatif Solusi.

.....Penyediaan fasilitas perlengkapan jalan harus selalu dioptimalkan karena meningkatnya jumlah kendaraan tiap tahun dan melakukan sosialisasi kepada pengguna jalan akan pentingnya fasilitas perlengkapan jalan agar dapat mengurangi kemacetan dan tingkat kecelakaan yang terjadi serta menciptakan kelancaran dan keselamatan dalam berlalu lintas.

Sasaran 3 : Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana transportasi yang berkualitas dan didukung dengan sumber daya manusia transportasi yang handal, efisien dan efektif.

a. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Sasaran

Tabel 3.3
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Ketersediaan Sarana dan Prasarana Transportasi Yang Berkualitas dan Di dukung dengan Sumber Daya Manusia Transportasi yang Handal, Efisien dan Efektif

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1.	Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana transportasi yang berkualitas dan didukung dengan sumber daya manusia transportasi yang handal, efisien dan efektif	Pemasangan Rambu-rambu	Unit	150	16	10,66
		Persentase Pelayanan Angkutan Umum	Persen	60	50	83,33
		Jumlah Uji Kir Angkutan Umum	Buah	1.810	3.230	178,45
		Persentase Kepemilikan Kir Angkutan Umum	Persen	60	60	100

.....Untuk pengukuran Indikator Capaian berdasarkan Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP untuk Tahun Anggaran 2019 belum dilaksanakan sehingga informasi capaian Kinerja belum dapat disampaikan dalam Laporan Kinerja (LKj) Dinas Perhubungan Tahun 2019,hal tersebutdisebabkan karena pelaksanaan Evaluasi oleh Inspektorat Provinsi dan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI dilakukan setelah batas akhir penyusunan LKj sampai dengan 2 bulan setelah tahun anggaran berakhir dan untuk Kabupaten / Kota dilaksanakan 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir sehingga pelaksanaan evaluasi menyesuaikan dengan batas akhir penyampaian LKj tersebut.

b. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Sebelumnya

Tabel 3.4

**Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Sasaran 3
Tahun 2018 s/d 2019**

No	Indikator Kinerja	Capaian		
		2017	2018	2019
1.	Pemasangan Rambu-rambu	-	16	16
2.	Persentase Pelayanan Angkutan Umum	-	50	50
3.	Jumlah Uji Kir Angkutan Umum		3.171	3.230
4.	Persentase Kepemilikan Kir Angkutan Umum		50	60

Realisasi capaian indikator kinerja pertama pada sasaran tiga tahun 2019 hanya mencapai 16 unit dari target 150 unit, sama capaiannya dari tahun 2018 (tahun sebelumnya) sebesar 16 buah; realisasi capaian indikator kinerja kedua pada sasaran tiga tahun 2019 mencapai 50% dari target 60%, lebih besar capaiannya dari tahun 2018 (tahun sebelumnya) sebesar 50%; realisasi capaian indikator kinerja ketiga pada sasaran tiga tahun 2019 mencapai 3.230 buah dari target 1.810 buah, lebih besar capaiannya dari tahun 2018 (tahun sebelumnya) sebesar 3.171 buah; sedangkan realisasi capaian indikator kinerja keempat pada sasaran tiga tahun 2019 mencapai 60% dari target 60%, lebih besar capaiannya dari tahun 2018 (tahun sebelumnya) sebesar 50%.

c. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan Atau Peningkatan / Penurunan Kinerja Serta Alternative Solusi Yang Telah Dilakukan

Penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja sebagai berikut :

Berdasarkan tabel tersebut di atas dapat diketahui bahwa capaian kinerja pada tahun 2019 terealisasibelum disampaikan dalam laporan kinerja 2019 disebabkan evaluasi oleh Inspektorat Kabupaten dilaksanakan setelah penyusunan laporan kinerja ini.

Adapun solusi yang dilakukan adalah :

d. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 3.5
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada Sasaran 1

No	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (%)	Efisiensi (%)
1	2	3	4	5=3-4
1.	Pemasangan Rambu-rambu	10,66	69,82	100
2.	Persentase Pelayanan Angkutan Umum	83,33		
3.	Jumlah Uji Kir Angkutan Umum	178,45		
4.	Persentase Kepemilikan Kir Angkutan Umum	100		
	Rata – rata capaian kinerja	100		

Bagian ini terkait dengan efisiensi anggaran untuk sasaran Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana transportasi yang berkualitas dan didukung dengan sumber daya manusia transportasi yang handal, efisien dan efekif pada indikator sasaran ini, terdapat delapan kegiatan yang pencapaian kinerjanya mencapai 69,82%. Terlihat bahwa terdapat satu indikator sasaran yang menunjukkan pencapaian dengan predikat **sangat kurang**, dua indikator sasaran menunjukkan pencapaian **baik** dan satu indikator sasaran menunjukkan pencapaian dengan predikat **baik sekali**.

e. Analisis Program / Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja.

Program dari sasaran ini adalah Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan. Indikator Kinerja dari sasaran ini dapat dilihat pada tabel 3...1 diatas yaitu Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan dengan capaian kinerja 100% dan Rasio Ijin Trayek dengan capaian kinerja 60%. Adapun alokasi anggaran untuk mendukung program ini adalah sebesar Rp. 25.000.000,-dengan realisasi sebesar Rp. 24.890.000,- atau 99,56% dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk mencapai sasaran ini adalah

f. Permasalahan dan Alternatif Solusi.

.....Penyediaan fasilitas perlengkapan jalan harus selalu dioptimalkan karena meningkatnya jumlah kendaraan tiap tahun dan melakukan sosialisasi kepada pengguna jalan akan pentingnya fasilitas perlengkapan jalan agar dapat mengurangi kemacetan dan

tingkat kecelakaan yang terjadi serta menciptakan kelancaran dan keselamatan dalam berlalu lintas.

C. Akuntabilitas Keuangan.

1. Realisasi Penerimaan

1. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	Rp.	563.658.000,-	(138,91%)
2. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	Rp.	165.080.000,-	(100,34%)
3. Retribusi Terminal	Rp.	133.180.000,-	(66,59%)
4. Retribusi Tempat Khusus Parkir	Rp.	5.140.000,-	(93,21%)
5. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	Rp.	5.450.000,-	(75,69%)
6. Retribusi Izin Trayek	Rp.	7.930.000,-	(132,16%)
7. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	Rp.	50.980.000,-	(100%)
Jumlah		Rp. 941.418.000,-	(119,31%)

2. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran APBD yang dikelola Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kab. Bone Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 1.866.946.043,- (88,69%).

Anggaran Kinerja :

- Belanja Tidak Langsung	Rp.	2.923.570.151,-	89,63%
- Belanja Langsung	Rp.	2.043.621.806,-	99,69%
Jumlah		Rp. 4.967.191.957,-	93,51%

3. Pemanfaatan Anggaran

Pemanfaatan anggaran yang bersumber dari anggaran kinerja Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kab. Bone terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung

Realisasi anggaran belanja tidak langsung SKPD Dinas Perhubungan Kab. Bone dalam Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 2.923.570.151,- (89,63%) yang diarahkan untuk : Gaji dan Tunjangan sebesar Rp. 2.764.470.104,- dan Tambahan Penghasilan PNS sebesar Rp. 159.100.047,-.

b. Belanja Langsung

Realisasi anggaran belanja langsung SKPD Dinas Perhubungan Kab. Bone Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 2.043.621.806,- (99,69%) dengan jumlah 8 program dan 24 kegiatan.

4. Penghargaan yang Diterima

Penghargaan yang diterima pada tahun 2018 : **TIDAK ADA.**

5. Permasalahan dan Solusi

Beberapa hal yang berpengaruh sehingga pencapaian kinerja sasaran SKPD Dinas Perhubungan Kab. Bone tahun 2018 belum tercapai secara optimal disebabkan hal-hal sebagai berikut :

1) Masalah Strategis

Bagaimana daya dukung sektor transportasi dalam upaya pencapaian visi kesejahteraan pemerintah daerah Kabupaten Bone.

2) Masalah Statis

a. Regulasi (Perda)

b. Sumber Daya Manusia yang berkualitas

3) Masalah Teknis

a. Kurang optimalnya terminal dalam pengelolaan pengoperasian kendaraan dan dikarenakan Terminal Petta PonggawaE Tipe A dikelola oleh Kementerian Perhubungan.

b. Kurangnya tenaga ahli di bidang perhubungan darat, laut dan udara.

c. Tidak adanya gedung kantor sendiri dan untuk sementara berkantor di **GOR LAPATAU WATAMPONE.**

Oleh karena itu untuk tahun yang akan datang diupayakan langkah-langkah antisipatif sebagai berikut :

1) Aspek Strategis

- a. Mendorong peningkatan kapasitas kelembagaan Bandara Arung Palakka Bone dari Bandara Kelas III menjadi Bandara Kelas II.

Tujuan : Perubahan status kelembagaan berimplikasi pada percepatan pembangunan Bandar Udara Arung Palakka Bone.

- b. Mendorong peningkatan kapasitas Pelabuhan Rakyat BajoE melalui perubahan rencana induk Pelabuhan Rakyat BajoE menjadi Pelabuhan Perintis Nasional.

Tujuan : Pelabuhan Perintis Nasional akan melayani angkutan penumpang PELNI dengan kapasitas dermaga yang dapat melayani kapal bertonase 3.000 Grass Ton.

- c. Mendorong peningkatan kapasitas Pelabuhan Regional PattiroE Sompe (Cappa Ujung) menjadi Pelabuhan Peti Kemas.

Tujuan : Dapat melayani kegiatan bongkar muat kapal peti kemas

2) Aspek Taktis

- a. Perencanaan Transportasi Darat

- TATRALOK
- Rencana Induk LLAJ
- Rencana Umum Jaringan Trayek

- b. Penguatan Regulasi Teknis

- Perda ANDALALIN
- Perda Penyelenggaraan Angkutan
- Perda Perparkiran
- Keputusan Bupati tentang batas trayek angkutan perkotaan dan perdesaan dalam kabupaten

- c. Penguatan Lembaga Teknis

- Pembentukan UPTD Pengujian, Terminal dan Perparkiran

- d. Dukungan Teknis SDM

- Diklat Dasar Transportasi Darat
- Diklat Keahlian Dasar
- Diklat Khusus Keahlian Penguji dan Penyidik

3) Aspek Teknis

- a. Perlu pengadaan gedung kantor untuk lebih meningkatkan kinerja pegawai.

- b. Pemasangan rambu-rambu di kabupaten Bone selalu dioptimalkan dan melakukan sosialisasi kepada pengguna jalan akan pentingnya mematuhi rambu-rambu lalu lintas agar dapat mengurangi tingkat kecelakaan yang terjadi dan menciptakan kelancaran dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan.
- c. Perlunya pelatihan dan bimbingan teknis untuk melahirkan tenaga ahli di bidang darat, laut dan udara.
- d. Koordinasi pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan perlu diselenggarakan secara berkelanjutan antara Pemerintah Daerah Kabupaten, Provinsi dan Pemerintah Pusat sehingga pelayanan angkutan penumpang dan barang dapat diselenggarakan secara optimal baik di sektor transportasi darat, laut maupun udara.



Dalam manajemen pembangunan berbasis kinerja dan perbaikan pelayanan publik, setiap organisasi pemerintah melakukan pengukuran dan pelaporan atas kinerja institusi dengan menggunakan indikator yang jelas dan terukur. Bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah, LKj menjadi bagian dari upaya pertanggungjawaban dan mendorong akuntabilitas publik. Sementara bagi publik sendiri, LKj akan menjadi ukuran akan penilaian dan juga keterlibatan publik untuk menilai kualitas kinerja pelayanan dan mendorong tata kelola pemerintahan yang baik.

LKj bagi SKPD Dinas Perhubungan Kab. Bone juga menjadi punya makna strategis, sebagai bagian dari penerjemahan tugas dan fungsi SKPD Dinas Perhubungan Kab. Bone. Pengukuran-pengukuran kinerja telah dilakukan, dan dikuatkan dengan data pendukung yang mengurai bukan hanya pencapaian tahun pelaporan 2019, namun juga melihat tren pencapaiannya dari tahun ke tahun, dan kontribusinya untuk pencapaian target akhir RENSTRA. Secara umum, nampak bahwa kinerja Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kab. Bone pada tahun 2018 adalah sangat baik, karena terdapat 2 indikator memenuhi kriteria sangat tinggi dan 1 indikator yang tidak memenuhi kriteria.

Dari evaluasi dan analisis atas pencapaian sasaran dan IKU yang sudah diuraikan dalam bab III, terlihat bahwa kerja keras telah dilakukan oleh SKPD Dinas Perhubungan Kab. Bone untuk memastikan pencapaian kinerja sebagai prioritas dalam pembangunan daerah. Upaya ini telah mencakup perumusan dan penetapan kinerja tahunan dan juga menengah sebagai bagian dari kebijakan strategis maupun tahunan daerah, khususnya dalam RENSTRA dan RENCANA KERJA (RENJA) 2019, yang mencakup juga penentuan program/kegiatan dan alokasi anggarannya. Juga mencakup bukan hanya sekedar pelaksanaan program/kegiatan yang rutin dilakukan, namun juga pengembangan inovasi dalam berbagai bentuk.

Namun demikian, beberapa tantangan perlu menjadi fokus bagi perbaikan kinerja Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kab. Bone ke depan dan untuk

lebih meningkatkan kualitas kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bone, diupayakan :

1. Mengoptimalkan pengalokasian anggaran untuk meningkatkan kinerja sarana dan prasarana keselamatan LLAJ;
2. Mengintensifkan koordinasi antara pemerintah daerah Kab. Bone dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Pemerintah Pusat;
3. Diperlukan komitmen bersama seluruh pegawai Dinas Perhubungan Kabupaten Bone untuk meningkatkan kualitas kinerja masing-masing, sehingga pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi dapat dilakukan secara efektif dan efisien serta berhasil guna;
4. Meningkatkan bimbingan dan pelatihan teknis secara komprehensif sehingga seluruh aparatur Dinas Perhubungan Kabupaten Bone memiliki kompetensi yang lebih di masing-masing bidang.

Bagi instansi di lingkungan Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kab. Bone sendiri, ini bisa berarti perlunya peningkatan efektivitas dan pencapaian kinerja sehingga beberapa tantangan ini bisa dijawab.

Sebagai bagian dari perbaikan kinerja pemerintah daerah yang menjadi tujuan dari penyusunan LKj, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan oleh instansi di lingkungan Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kab. Bone untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan di tahun yang akan datang. Beberapa permasalahan dan solusi yang sudah dirumuskan akan menjadi tidak punya makna jika hanya berhenti menjadi laporan saja, namun harus ada rencana dan upaya konkret untuk menerapkannya dalam siklus perencanaan dan pelaksanaannya. Hal ini akan menjadikan LKj benar-benar menjadi bagian dari sistem monitoring dan evaluasi untuk pijakan peningkatan kinerja pemerintahan dan perbaikan layanan publik.

Watampone, 12 Februari 2020

KEPALA DINAS



Drs. H. MUHAMMAD RIDWAN, M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP. : 19650508 199303 1 010